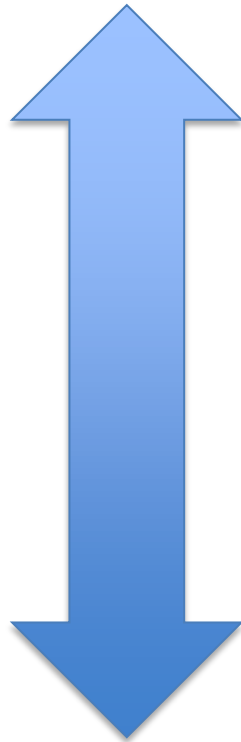




RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat

daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan ;
8. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2023 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun

2023 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2023.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 terdiri dari 3 program, 10 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.548.361.700,-dengan fokus utama pada Pelayanan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada Bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan antara lain meliputi :

1. Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
2. Kebutuhan masyarakat akan buku baru semakin meningkat;
3. Masih ada bahan koleksi perpustakaan yang belum dilestarikan karena kondisinya rusak berat;
4. Belum ada perpustakaan/lembaga yang mengikuti inter library loan (peminjaman koleksi antar perpustakaan);
5. Belum semua perpustakaan/lembaga mengikuti program book loan (peminjaman koleksi buku oleh perpusda ke perpus sekolah/desa) ;
6. Belum semua perpustakaan yang ada di masyarakat, sekolah, dan lembaga lainnya mendapatkan pembinaan;

7. Minimnya jumlah perpustakaan berprestasi karena masih banyak perpustakaan yang belum dikelola dengan baik;
8. Belum efektifnya kegiatan sosialisasi dan promosi yang ditandai dengan belum tercapainya target kunjungan ke perpustakaan;
9. Terbatasnya jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan sehingga mengakibatkan jumlah pengelola perpustakaan yang mendapatkan peningkatan kapasitas juga terbatas;
10. Rendahnya minat untuk menjadi pustakawan;
11. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
12. Terbatasnya pengawasan pemanfaatan layanan internet berakibat pada pemanfaatan internet di perpustakaan yang belum sesuai peruntukannya;
13. Keterbatasan sarana pendukung yaitu ruang/gedung yang memiliki kapasitas memadai;
14. Belum adanya budaya etnis nusantara yang dikoleksi/dibukukan;
15. Belum tersedianya jaringan informasi kearsipan;
16. Belum dilaksanakannya pengelolaan arsip statis;
17. Belum semua pengelola arsip mendapat kesempatan peningkatan kapasitas;
18. Belum adanya kesadaran setiap OPD untuk menganggarkan pengelolaan arsip inaktif;
19. Belum tersedianya gedung yang memadai untuk menyelenggarakan layanan sesuai tugas dan fungsi dinas, gedung yang ditempati saat ini adalah gedung hibah eks Deppen RI;

Dari 2 program, 10 kegiatan, dan 19 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten

Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 3 program, 10 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.548.361.700

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 10 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4.363.290.000,-. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021, tidak ada program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah .

Dinamika yang terjadi selama tahun 2021 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Pembinaan Perpustakaan, Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota, Sub Keg Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah kab/kota, Program Pengelolaan Arsip, Keg Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab /Kota, Sub Keg Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis, Sub Keg Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis , Keg Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah Kab/Kota, Sub Keg Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota, Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota ,

Keg Administrasi Keuangan Daerah, Sub Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Terjadinya wabah Covid-19 yang menyebabkan perubahan target kinerja dan sistem kerja;
 2. Keterbatasan Anggaran.
 3. Keterbatasan SDM.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , Sub Keg Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , Sub Keg Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Sub Keg Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Program Pengelolaan Arsip, Keg Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Sub Keg Sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat wajib dan rutin.
 2. Kesesuaian antara jumlah anggaran dan target kinerja
- c. Sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota , Keg Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya evaluasi SAKIP secara rutin tiap tahunnya
2. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*jelaskan implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Pencermatan dalam penentuan target kinerja
2. Penyesuaian target dengan ketersediaan anggaran

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Perpustakaan									
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengunj ung perpusta kaan perta hu n		27,08% (172.934 +11.233 /597.94 3)	6,10%	1,81% (10.870/5 97.943)	69,67%	6,19%	2%	

1.1	<i>Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pengunjung Perpustakaan Per Tahun		27,08% (172.934 +11.233 /597.943)	6,10%	1,81% (10.870/597.943)	69,67%	6,19%	1,85% 11.000/597.493	
1.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	<i>Jumlah literatur sekunder / karya cetak/ karya rekam yang terpenuhi</i>	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengembangan layanan perpustakaan</i>	5 layanan	20 layanan	5 layanan	4 layanan	80%	5 layanan	5 layanan	100%

1.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang meningkat pengelolaannya	100 perpust	177 perpust	100 perpust	75 peprus	75 %	0	0	0
1.1.4	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengelola perpustakaan yang meningkat kapasitasnya</i>	150 orang	150 orang	75 orang	75 orang	100%	0	0	0
1.1.5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	<i>Jumlah penambahan koleksi bahan pustaka</i>	1500 eksemplar	9.472 eksemplar	1500 eksp	1500 eksp	100%	800 eksp	800 eksp	100%

1.2	<i>Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pengunjung Perpustakaan Per Tahun		27,08% (172.934+11.233/597.943)	6,10%	1,81% (10.870/597.943)	69,67%	6,19%	2%	
1.2.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	<i>Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca</i>	5 layanan	15 layanan	5 layanan	5 layanan	100%	5 layanan	5 layanan	100%
	Urusan Kearsipan									
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Persentase arsip yang dikelola</i>		24,99%	8,33% (4 /48 OPD)	8,33%	100%	8,33%	8,33%	100%
2.1	<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase arsip yang dikelola</i>		24,99%	8,33%	8,33%	100%	8,33%	8,33%	100%

2.1.1	Sub kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	<i>Jumlah lembaga yang di evaluasi dan monitor</i>	210 desa/ lembaga	35 desa / Lembaga	75 desa	35 desa	100%	75 desa	21 desa	100%
2.1.2	Sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	<i>Jumlah lembaga daerah yang ditangani arsipnya</i>	20 lembaga	12 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	100%	0 lembaga	0 lembaga	0
		<i>Jumlah arsip vital yang dikelola</i>	800 berkas	1.155 berkas	800 berkas	707 berkas	100%	400 berkas	400 berkas	100%

3.1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Nilai SAKIP OPD		71,60	56,00	70,04	125%	56,50	70,04	125%
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen PEP yang terpenuhi		12 dok	4 dok	8 dok	200%	8 dok	8 dok	100
3.2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terpenuhi		3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
3.2.2	Sub Kegiatan	Jumlah		9 orang	9 orang	8 orang	90%	9 orang	9 orang	100%

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jasa administrasi keuangan yang terpenuhi								
3.3	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.3.1	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor yang terpenuhi</i>		3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100%

		ran yang terpenuhi i								
3.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa kantor yang terpenuhi i		4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
3.5.2	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Presenta se sarana dan prasara na aparatu r yang terpenu hi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administ rasi perkanto ran yang terpenuhi i		6 orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	6 orang	100%

3.5.3	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara		4 lokal	4 lokal	4 lokal	100%	4 lokal	4 lokal	100%
3.5.4	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		25 unit	5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 29 Indikator. Dari 29 indikator tersebut, 22 berstatus tercapai dan 7 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Faktor eksternal yaitu terjadinya pandemi covid 19 yang mengakibatkan penyesuaian target dan perubahan cara kerja .
2. Faktor Kurangnya anggaran yang tersedia, menyebabkan target tidak tercapai.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (belum ada SDM yang memiliki sertifikasi barang/jasa).

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi :

1. Pencermatan dalam penentuan target kinerja
2. Penyesuaian target dengan ketersediaan anggaran

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungawaban Nasional pasal 40 dan 59 Undang Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		IKK OUT COM E					0,50	0,75	0,75	0,75	Tingkat capaian IKK masih rendah

2	Tingkat ketersediaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah , pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat		IKK OUT COM E					66,67	2367,50	2500	2550	Tingkat capaian IKK sedang
3	Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat		IKK OUT COM E					0				
4	Indeks		IKK					0				

	pembanguna n literasi masyarakat		OUT COM E									
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu urusan kearsipan dan urusan perpustakaan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup 2 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

a. **Permasalahan terkait bidang Kearsipan**

- Belum adanya Perda tentang Kearsipan;
- Peraturan-peraturan Bupati tentang kearsipan belum sepenuhnya dipahami dan disosialisasikan kepada OPD dan instansi-instansi lain;
- Belum dilaksanakannya pengelolaan arsip statis;
- Belum ada kesadaran dari semua OPD/ Desa/ Perusahaan/ Organisasi Politik/ Organisasi Kemasayarakatan/ Perseorangan untuk menyerahkan arsip statis ke DISARPUS;
- Belum semua pengelola arsip mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kapasitas;
- Belum semua OPD/ Desa/ Perusahaan/ Organisasi Politik/ Organisasi Kemasayarakatan/ Perseorangan melaksanakan penanganan dan pengelolaan arsip dinamis inaktif di masing-masing Unit Pencipta Arsip, serta belum adanya tenaga/ staf khusus yang menanganinya;
- Belum dilaksanakannya penyerahan arsip ke ANRI;
- Belum tersedianya jaringan informasi kearsipan;
- Masih terbatasnya arsip yang dialih mediakan karena

keterbatasan SDM yang menguasai IT, keterbatasan sarana pendukung;

- Belum adanya kesadaran setiap OPD untuk menganggarkan pengelolaan arsip inaktif;
- Belum adanya kesadaran setiap OPD untuk mengajukan usulan arsiparis ke Badan Kepegawaian dan Bagian Organisasi.

b. Permasalahan terkait bidang perpustakaan

- Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
- Kebutuhan masyarakat akan buku baru semakin meningkat;
- Masih ada bahan koleksi perpustakaan yang belum dilestarikan karena kondisinya rusak berat;
- Belum ada perpustakaan/lembaga yang mengikuti inter library loan (pinjam koleksi antar perpustakaan);
- Belum semua perpustakaan/lembaga mengikuti program book loan (pinjam koleksi dari perpustakaan ke perpustakaan sekolah/desa/TBM);
- Belum semua perpustakaan yang ada di masyarakat, sekolah, dan lembaga lainnya mendapatkan pembinaan;
- Minimnya jumlah perpustakaan berprestasi karena masih banyak perpustakaan yang belum dikelola dengan baik;
- Belum efektifnya kegiatan sosialisasi dan promosi yang ditandai dengan belum tercapainya target kunjungan ke perpustakaan;
- Masih rendahnya kesadaran OPD/Lembaga lain untuk menyerahkan hasil terbitannya ke perpustakaan daerah;
- Terbatasnya jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;

- Terbatasnya pengawasan pemanfaatan layanan internet berakibat pada pemanfaatan internet di perpustakaan yang belum sesuai peruntukannya;
- Keterbatasan sarana pendukung yaitu ruang/gedung yang memiliki kapasitas memadai, serta belum tersedianya sarana prasarana bagi kaum disabilitas;
- Masih banyak perpustakaan yang belum mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana dikarenakan motivasi memajukan perpustakaan masih rendah;
- Belum ditemukannya naskah kuno yang ada di Banjarnegara (minimal berumur 45 tahun, masih ditulis tangan dan belum dicetak);
- Belum adanya budaya etnis nusantara yang dikoleksi/dibukukan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

Tantangan

Kearsipan dan perpustakaan perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada supaya tetap dibutuhkan masyarakat sehingga ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- a. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang kearsipan dan perpustakaan yang begitu pesat sehingga kearsipan dan perpustakaan perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada;

- b. Tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dalam mengakses dan memperoleh informasi di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. Era Globalisasi yang mengakibatkan tuntutan akan keterbukaan dan akuntabilitas oleh masyarakat semakin kuat.

Peluang

Disamping beberapa tantangan diatas kearsipan dan perpustakaan juga memiliki beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di mana setiap penerbit diwajibkan untuk menyerahkan hasil karyanya baik cetak maupun rekam sebagai koleksi daerah di perpustakaan;
- b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dimana setiap Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perpustakaan umum di wilayahnya dan menjadi urusan wajib;
- c. Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan bahwa kepala daerah baik provinsi maupun Kab/Kota untuk menjamin ketersediaanya arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamisasikan sistem kearsipan

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2023 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2021. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan

pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2022, sebagai berikut :

- a) Belum tersedianya gedung yang memadai untuk menyelenggarakan layanan sesuai tugas dan fungsi dinas, gedung yang ditempati saat ini adalah gedung hibah eks Deppen RI;
- b) Belum dilaksanakannya pengelolaan arsip statis;
- c) Belum semua pengelola arsip mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kapasitas;
- d) Belum semua OPD/ Desa/ Perusahaan/ Organisasi Politik/ Organisasi Kemasayarakatan/ Perseorangan melaksanakan penanganan dan pengelolaan arsip dinamis inaktif di masing-masing Unit Pencipta Arsip, serta belum adanya tenaga/ staf khusus yang menanganinya;
- e) Belum dilaksanakannya penyerahan arsip ke ANRI;
- f) Belum semua OPD/ Desa/ Perusahaan/ Organisasi Politik/ Organisasi Kemasayarakatan/ Perseorangan menyerahkan dokumentasi yang menghasilkan arsip;
- g) Belum tersedianya jaringan informasi kearsipan;
- h) Masih terbatasnya arsip yang dialih mediakan karena keterbatasan SDM yang menguasai IT, keterbatasan sarana pendukung;
- i) Belum adanya kesadaran setiap OPD untuk menganggarkan pengelolaan arsip inaktif
- j) Belum adanya kesadaran setiap OPD untuk mengajukan usulan arsiparis ke Badan Kepegawaian dan Bagian Organisasi.
- k) Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
- l) Belum semua perpustakaan yang ada di masyarakat, sekolah, dan lembaga lainnya mendapatkan pembinaan;

- m) Masih rendahnya kesadaran OPD/Lembaga lain untuk menyerahkan hasil terbitannya ke perpustakaan daerah;
- n) Terbatasnya jumlah pengelola perpustakaan yang mendapatkan peningkatan kapasitas;
- o) Rendahnya minat untuk menjadi pustakawan;
- p) Keterbatasan sarana pendukung yaitu ruang/gedung yang memiliki kapasitas memadai, serta belum tersedianya sarana prasarana bagi kaum disabilitas;
- q) Belum ditemukannya naskah kuno yang ada di Banjarnegara (minimal berumur 45 tahun, masih ditulis tangan dan belum dicetak);
- r) Belum adanya budaya etnis nusantara yang dikoleksi/dibukukan

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Tidak tercapainya target kinerja Kepala Daerah
2. Rendahnya kinerja Perangkat Daerah
3. Kebutuhan Literasi masyarakat tidak tercukupi;
4. Penanganan Arsip yang tidak tertib;
5. Kurangnya koleksi arsip-arsip bersejarah milik daerah yang tersimpan;
6. Rendahnya minat budaya baca;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023 meliputi:

1. Pemenuhan Pembangunan Urusan Kearsipan

2. Pemenuhan Pembangunan Urusan Perpustakaan

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Peprustakaan										
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Banjarnegara	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	2,28%		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Banjarnegara	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	2,28%		
1.1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	2,28%		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	2,28%		
1.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Disarpus	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM :	1 layanan	75.000.000,00	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Disarpus	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen TIK	1 layanan	76.450.000	

			Information Technology Service Management)					Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			
1.1.2	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kot a	Disarpus	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten /kota sesuai kewenangannya	60 perpustaka an	80.000.000	Pengembang an perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ko ta	Disarpus	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/kot a sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten /kota sesuai kewenanganny a	100 perpus takaan	130.000.000	
1.1.3	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kot a	Banjarne gara	Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	75 perpustaka an	50.000.000	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/ko ta	Banjarne gara	Jumlah perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	100 perpus takaan	50.000.000	

1.1.4	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	Banjarnegara	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	50 orang	50.000.000	Peningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	Banjarnegara	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	100 orang	70.000.000	
1.1.5	Pengelolaan dan pengembangan bahan Pustaka	Disarpus	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	800 eksp	80.000.000	Pengelolaan dan pengembangan bahan Pustaka	Disarpus	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	1000	150.000.000	
1.2	Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Disarpus	Persentase pembudayaan kegemaran membaca	100%							
1.2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan literasi pada satuan pendidikan	Disarpus	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada	10 lokus	200.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan literasi pada satuan pendidikan	Disarpus	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada	10 lokus	400.000.000	

	dasar dan Pendidikan khusus serta masyarakat		satuan Pendidikan			dasar dan Pendidikan khusus serta masyarakat		satuan Pendidikan			
	Urusan Kearsipan										
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi									
2.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Banjarnegara	Nilai Sakip OPD	70,04							
2.1.1.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banjarnegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	11.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banjarnegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	10 laporan	50.000.000	

								Realisasi Kinerja SKPD			
2.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banjarne gara	Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi	100%							
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disarpus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orng/ 12 bulan	3.231.361.700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disarpus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orng/ 12 bulan	3.231.361.700	
2.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disarpus	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	80.000.000	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disarpus	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokum en	80.000.000	
2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disarpus	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	100%							
2.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disarpus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disarpus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	45.000.000	
2.3.2.	Penyediaan Bahan Logistik	Disarpus	Jumlah Paket Bahan Logistik	16 paket	200.000.000	Penyediaan Bahan	Disarpus	Jumlah Paket Bahan	16	250.000.000	

	Kantor		Kantor yang Disediakan			Logistik Kantor		Logistik Kantor yang Disediakan	paket		
2.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disarpus	Persentase sarana prasarana Gedung yang terpenuhi	100%							
2.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disarpus	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	60.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disarpus	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	80.500.000	
2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disarpus	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%							
2.5.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disarpus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	55.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disarpus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	60.500.000	
2.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disarpus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	137.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disarpus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	137.000.000	

			yang Disediakan					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disarpus	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%							
2.6.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disarpus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disarpus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	4 unit	300.000.000	
2.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disarpus	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disarpus	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	15 unit	60.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Banjaran	Persentase tata Kelola kearsipan yang baik untuk mencapai reformasi birokrasi	100%							

3.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Persentase arsip yang ditata dan dikelola	100%							
3.1.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Disarpus	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	450 berkas	35.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Disarpus	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	450 berkas	55.000.000	
3.1.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Disarpus	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 berkas	65.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Disarpus	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 berkas	70.000.000	
3.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Persentase pengelolaan arsip statis	6,81 %							
3.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Disarpus	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 arsip	20.0000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Disarpus	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 arsip	40.0000.000	
3.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi	Banjarnegara	Persentase kualitas pelayanan informasi kearsipan yang prima	100%							

	Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota										
3.3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Disarpus	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5 pengguna	225.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Disarpus	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5 pengguna	225.000.000	
3.3.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Disarpus	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	70.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Disarpus	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	170.000.000	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Banjarnegara	Ketersediaan arsip yang autentik, utuh, aman dan terpercaya dilingkup daerah	6,81%							
4.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah	Disarpus	Persentase Prangkat Daerah yang arsipnya dimusnahkan	6,81%							

	Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun										
4.1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Disarpus	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2000 arsip	40.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Disarpus	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2000 arsip	80.000.000	
4.2	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Disarpus	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang terautentikasi	2.200 berkas							
4.2.1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Disarpus	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	30 arsip	10.000.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Disarpus	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	30 arsip	25.000.000	

4.2.2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Disarpus	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30 arsip	10.000.000	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Disarpus	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30 arsip	25.000.000	
4.3	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Banjarnegara	Persentase penetapan daftar pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang	100%							
4.3.1	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Disarpus	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	3 arsip	10.000.000	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Disarpus	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	3 arsip	25.000.000	
5	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Banjarnegara	Pemanfaatan arsip tertutup yang hanya bisa diakses untuk kepentingan tertentu	100%							
5.1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di	Disarpus	Persentase daftar pencarian arsip bersifat tertutup yang diterbitkan	100%							

	Kabupaten/Kota										
5.1.1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Disarpus	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	60.000.000	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Disarpus	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	150.000.000	
5.1.2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Disarpus	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	3 daftar	10.000.000	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Disarpus	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	3 daftar	20.000.000	
	JUMLAH				5.149.361.700					6.080.811.700	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Sasaran strategis OPD bisa terwujud melalui pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Tercapainya indikator kinerja .

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Nihil	-	-	-	-

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	Nihil	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara diselaraskan dengan program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh ANRI dan Perpustakaan Nasional.

3.1.1. Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra

Sasaran pembangunan ANRI tertuang dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024, antara lain :

- a) “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan’
- b) “Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional” dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip
- c) “Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima” dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan;
- d) “Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Dari Sasaran ANRI tersebut sangat relevan dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara

Sementara di bidang perpustakaan Sasaran Strategis Perpustakaan tertuang dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 yang telah disahkan pada tanggal 28 Agustus 2020.

Sasaran Strategis Perpusnas tersebut yaitu :

“Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”

Dari sasaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa Sasaran Strategis Perpusnas relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Banjarnegara yaitu “Meningkatnya minat baca masyarakat”.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Kabupaten Banjarnegara sesuai RPJPD adalah **Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian** , Adapun Misi pada tahun keempat RPJPD yang selaras dengan tujuan dan Sasaran Strategis OPD yaitu :

“ Pembangunan kearsipan diprioritaskan pada terciptanya tata pengolahan kearsipan yang terintegrasi (Intergrated system) antara manual dan elektronik pada tingkat SKPD dan Kecamatan ; serta perintisan pengembangan perpustakaan Desa / Kelurahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi”.

2.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

Tabel 3.3 .Rencana Program dan Kegiatan Disarpus Kab. Banjarnegara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Sumber Dana	Jumlah Pagu			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DISARPUS					5.149.361.700			6.502.611.700
2	23				PERPUSTAKAAN								750.000.000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Banjarnegara			535.000.000			750.000.000
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Banjarnegara	2,27% (13.600/ 597.493 x 100)	APBD	335.000.000		2,30% (13.800/ 597.493x100)	550.000.000
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Disarpus	1 layanan	APBD	75.000.000	Penting	1 paket	85.000.000

2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Disarpus	5 layanan (Perpusling, Wisata Buku, Gelar Buku, Book Loan, Pemutaran Film Pendidikan, Story Telling)	APBD	80.000.000	Penting	5 layanan	150.000.000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten /kota sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Banjarnegara	75 perpustakaan	APBD	50.000.000	Penting	120 perpustakaan	60.000.000
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Banjarnegara	50 orang	APBD	50.000.000	Penting	150 orang	80.000.000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan	Disarpus	800 eksemplar	APBD	80.000.000	Sangat Penting	1500 eks	175.000.000

						Keberagaman Koleksi Perpustakaan							
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah KAbupaten/Kota	Persentase pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan	Disarpus	100%		200.000.000			200.000.000
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Disarpus	10 lokus	APB D	200.000.000	Sangat penting		200.000.000
2	24				KEARSIPAN					4.614.361.700			5.752.611.700
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	Disarpus	100%		4.059.361.700		100%	4.452.611.700
2	24	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Banjarne gara	BB 70,04		50.000.000		70,10	60.000.000
2	24	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Banjarnegara	10 dok	APBD	11.000.000	Penting	10 dok	60.000.000

						dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
2	24	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi	Disarpus	100%	APB D	3.311.361.700		100%	3.319.361.700
2	24	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disarpus	32 orng/ 12 bulan	APBD	3.231.361.700	Penting	1 tahun	3.231.361.700
2	24	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disarpus	36 dokumen	APBD	80.000.000	Penting	36 dokumen	88.000.000
2	24	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	Disarpus	100%	APB D	295.000.000		100%	330.000.000
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disarpus	3 paket	APBD	25.000.000	Penting	3 paket	55.000.000
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Disarpus	16 paket	APB D	200.000.000	Penting	16 paket	275.000.000

2	24	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana prasarana Gedung kantor yang terpenuhi	Disarpus	100%	APB D	80.500.000		100%	110.000.000
2	24	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Disarpus	6 unit : Scanner ukuran folio, Sepeda motor, Laptop, meja kursi tamu)	APB D	60.000.000	Sangat Penting	8 unit	110.000.000
2	24	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	Disarpus	100%	APB D	197.500.000		100%	217.250.000
2	24	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disarpus	5 laporan	APBD	55.000.000	Penting	5 paket	66.550.000
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disarpus	12 laporan	APBD	137.000.000	Penting	6 orang	150.700.000

2	24	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Disarpus	100%	APB D	360.000.000		100%	416.000.000
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disarpus	4 unit	APBD	200.000.000	Sangat Penting	4 unit	350.000.000
2	24	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disarpus	15 unit	APB D	60.000.000	Sangat Penting	15 unit	66.000.000
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tata kelola kearsipan yang baik untuk mencapai Reformasi Birokrasi	Disarpus	100%	APBD	415.000.000		100%	755.000.000
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang ditata dan dikelola	Disarpus	100%	APBD	100.000.000		100%	145.000.000
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan	Disarpus	450 berkas	APBD	35.000.000	Penting	600 berkas	60.000.000

						Digunakan							
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Disarpus	500 berkas	APBD	65.000.000	Penting	850 berkas	85.000.000
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan arsip statis	Disarpus	6,81%	APBD	20.000.000		11,36%	60.000.000
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Disarpus	100 arsip	APBD	20.000.000	Penting	300 arsip	60.000.000
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase kualitas pelayanan informasi kearsipan yang prima	Disarpus	100%	APBD	295.000.000		100%	550.000.000
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Disarpus	5 pengguna	APBD	225.000.000	Sangat Penting	2.500 berkas 7 unit	320.000.000
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit	Jumlah Laporan Hasil	Disarpus	1 laporan	APBD	70.000.000	Penting	35 lembaga	230.000.000

					Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						70 orang	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Ketersediaan arsip yang autentik, utuh, aman, dan terpercaya di lingkup daerah	Disarpus	6,81%	APBD	70.000.000		9,09%	215.000.000
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun)	Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya dimusnahkan	Disarpus	6,81%	APBD	40.000.000		9,09%	100.000.000

2	24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Disarpus	2000 arsip	APBD	40.000.000	Penting	2500 arsip	50.000.000
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang terautentikasi	Disarpus	2.200 berkas	APBD	20.000.000		3.350 berkas	80.000.000
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Disarpus	30 arsip	APBD	10.000.000	Penting	30 arsip	40.000.000
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian	Disarpus	30 arsip	APBD	10.000.000	Penting	50 arsip	40.000.000

						dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip							
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase penetapan daftar pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang	Disarpus	100%	APBD	10.000.000		100%	35.000.000
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuma n	Disarpus	3 DPA	APBD	10.000.000	Penting	6 DPA	35.000.000
2	24	04			PROGRAM PERIJINAN PENGUNAAN ARSIP	Pemanfaat an arsip tertutup yang hanya bisa diakses untuk kepentinga n tertentu	Disarpus	100%	APBD	70.000.000		100%	30.000.000
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di	Persentase daftar pencarian	Disarpus	100%	APBD	70.000.000		100%	30.000.000

					Kabupaten/Kota	arsip bersifat tertutup yang diterbitkan							
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Disarpus	1 SOP	APBD	60.000.000	Penting	1 SOP	70.000.000
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Disarpus	3 daftar	APBD	10.000.000	Penting	3 daftar	20.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2017-2022. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan adalah sebagai berikut :

(mengacu pada bab 5 RKPD)

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan yang terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 6 sub kegiatan yaitu Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik ; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan; Peningkatan Kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka serta sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.

Berdasarkan Kegiatan dan Sub kegiatan tersebut diatas, Bidang Perpustakaan pada tahun 2023 akan melaksanakan penambahan koleksi buku digital dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000, melaksanakan Pengembangan Layanan Perpustakaan berupa Perpustakaan keliling, gelar Buku, Wisata

Buku, Story telling , Book Loan serta melakukan survey indeks gemar membaca dan indeks literasi sebesar Rp. 80.000.000; melaksanakan supervise ke perpustakaan desa dan sekolah, sebesar Rp. 50.000.000; melaksanakan bintek tenaga perpustakaan sebesar Rp. 50.000.000; melaksanakan penambahan koleksi buku umum , pengolahan buku baru serta perbaikan buku rusak sebesar Rp. 80.000.000 dan melaksanakan sosialisasi budaya baca dan literasi , Pendidikan kemasyarakatan, Lomba -lomba bidang perpustakaan serta pengadaan sarana prasarana untuk Ruang Layanan Perpustakaan sebesar Rp. 200.000.000,-.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program pengelolaan arsip terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Keg Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dan Keg Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Dengan 5 sub kegiatan yaitu Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis; Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Akuisisi Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN, dan sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program perlindungan dan penyelamatan arsip terdiri dari 3 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota , dan kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.

Dengan 4 sub kegiatan yaitu Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun ; Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip; Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip; dan sub kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA).

c. Program Perijinan Penggunaan Arsip

Program Perijinan Penggunaan Arsip terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Dengan 2 Sub Kegiatan yaitu Sub Keg Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup dan Sub Keg Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.

Berdasarkan Kegiatan dan Sub kegiatan tersebut diatas, Bidang Kearsipan pada tahun 2023 akan melaksanakan Penataan Arsip aktif dengan biaya sebesar Rp. 35.000.000; melaksanakan pengelolaan arsip vital sebesar Rp. 65.000.000; bintek pengelola arsip sebesar Rp 70.000.000; melaksanakan akses arsip ke dalam JIKN serta penambahan sarpras kearsipan (pengadaan Roll o pack, lemari peta, scanner film negatif, filling cabinet, printer warna dan fotokopi,) sebesar Rp 225.000.000; Melaksanakan penilaian dan pemusnahan arsip sebesar Rp. 40.000.000; melaksanakan autentikasi arsip statis, alih media arsip sebesar Rp 10.000.000; membuat Daftar Pencarian Arsip Hilang Rp. 10.000.000, membuat Daftar

Arsip bersifat tertutup sebesar Rp 10.000.000; membuat Perda tentang Kearsipan sebesar Rp 60.000.000.

Selain melaksanakan Program pada Urusan Perpustakaan dan Kearsipan OPD juga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut difokuskan untuk pemenuhan kegiatan /operasional yang bersifat wajib dan rutin .

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Januari 2022

PLT. KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Asisten Administrasi Dan Umum



AZIZ ACHMAD, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620302 198703 1 007